



**PENGARUH IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA,  
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN  
INTERN, DAN TRANSPARANSI TERHADAP KUALITAS LAPORAN  
KEUANGAN PEMERINTAH DESA  
(Studi kasus pada Desa di kecamatan Pakem kabupaten Sleman)**

Teguh Erawati<sup>1\*</sup> Antonius Sahaduta Hamanay<sup>2</sup>  
Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi  
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa Yogyakarta  
\*email: [sahaduta106@gmail.com](mailto:sahaduta106@gmail.com)

---

**ARTICLE INFO**

**Article History**

Submission: 11 Mei 2022  
Reviewed: 27 Mei 2022  
Accepted: 31 Juni 2022  
Publish : 31 Juni 2022

**Keyword:**

Implementation of village  
financial system  
applications, Human  
Resource Competence,  
Internal Control System,  
Transparency, Quality of  
Village Government  
Financial Reports.

---

**ABSTRACT**

*This study aims to examine the effect of implementing village financial system applications, human resource competencies, internal control systems, and transparency on the quality of village government financial reports. The population in this study is the village government in Sleman district which consists of 17 sub-districts and 86 villages. The sample in this study was determined using the purposive sampling method, namely 50 respondents who were village officials in all village governments in Pakem sub-district, Sleman district, who were directly involved in preparing village government financial reports. The type of data used in this research is primary data by distributing questionnaires. The data analysis method used is data quality test, classical assumption test, and hypothesis testing. The results in this study state that the simultaneous implementation of village financial system applications, human resource competencies, internal control systems, and transparency each have a positive and significant effect on the quality of village government financial reports.*

---

**PENDAHULUAN**

Pemerintah desa merupakan salah satu cikal bakal organisasi pemerintahan untuk mencapai keberhasilan urusan pemerintahan pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan pemerintah desa lebih terintegrasi dengan masyarakat, sehingga setiap rencana dari pemerintah dapat lebih cepat disampaikan kepada masyarakat secara langsung. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa, yang secara garis besar pedoman pengelolaan keuangan desa meliputi asas pengelolaan keuangan desa, kekuasaan pengelolaan keuangan desa, struktur APBDesa, penyusunan rancangan APBDesa, penatausahaan dan ertanggungjawaban keuangan desa, pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) serta pembinaan dan pengawasan dalam mengelola keuangan desa. Maka dari itu sebagai bentuk pertanggungjawaban dan penyelenggaraan

pemerintah desa yang baik, pemerintah desa mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan yang berkualitas serta mendorong pemerintah untuk menerapkan akuntabilitas dan transparansi kepada publik agar terhindar dari kegiatan korupsi/penggelapan dana keuangan desa. Laporan keuangan merupakan salah satu media pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan aktivitasnya kepada publik yang berfungsi untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dan evaluasi kinerja pemerintah desa untuk dimasa yang akan datang, oleh sebab itu pemerintah desa dituntut untuk dapat menyajikan laporan keuangan yang berkualitas, sehingga hasil dari publikasi laporan keuangan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang memiliki nilai dan informasi keuangan tersebut dapat bermanfaat bagi yang menggunakannya (Widari & Sutrisno, 2017).

Fenomena yang pernah terjadi di kabupaten sleman, desa Banyurejo yakni adanya kasus penyelewengan anggaran dana desa tahun 2015 sampai 2016 yang dilakukan oleh oknum kepala desa. Hasil perhitungan dari Inspektorat Pemkab Sleman pada saat penyidikan menyebutkan bahwa negara mengalami kerugian sekitar Rp. 633.000.000. Kepala desa Banyurejo ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi pada bulan juni tahun 2019 oleh Pengadilan Tipikor Negeri Yogyakarta dengan pelanggaran UU RI No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atas perubahan UU No 31 tahun 1999. (Ari, 2019).

penelitian yang dilakukan oleh Rifandi (2019) dan Lubis (2018) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riandani (2017) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Susanti (2018) dan Kusuma (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2018) yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Widari & Sutrisno (2017) dan Riandani (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhan (2018) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Rifandi (2019) dan Amalia Rizky (2017) menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Riyanti (2017) yang menyatakan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti akan meneliti hubungan implementasi aplikasi sistem keuangan desa (SISKEUDES), kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern, dan transparansi dengan mengambil judul "Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Laporan keuangan adalah suatu bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara/daerah atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintah selama satu periode kepada publik. Kualitas laporan keuangan pemerintah desa dapat tercermin dari pemeriksaan yang dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK). Pemeriksaan atas laporan keuangan dilakukan untuk memberikan pendapat/opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam pelaporan keuangan yang merupakan hasil akhir dari proses akuntansi atau suatu ringkasan dari transaksi keuangan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010, laporan keuangan dapat dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan tersebut relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Karakteristik kualitatif laporan keuangan tersebut merupakan ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.

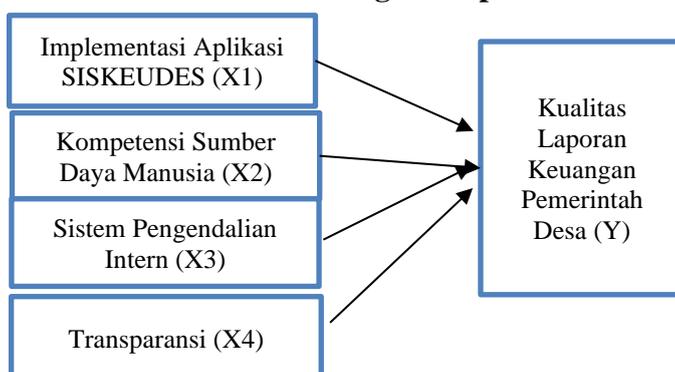
Penelitian Andrianto & Rahmawati (2017) menyatakan bahwa implementasi aplikasi sistem

keuangan desa merupakan pemanfaatan teknologi informasi yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa. Pemanfaatan teknologi informasi adalah perilaku menggunakan teknologi informasi yang meliputi komputer, perangkat lunak, database, dan jaringan untuk menyelesaikan tugas dan meningkatkan kinerja. Komputer dan jaringan merupakan teknologi informasi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Teori ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifandi (2019) dan Lubis (2018) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai. Sehingga harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu memberikan kontribusi secara optimal dalam pencapaian tujuan organisasi karena sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam sebuah organisasi (Febriyanto, 2019). Teori ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2018) dan Kusuma (2017) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sistem pengendalian intern merupakan suatu kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi manajemen untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan dan pendeteksian penggelapan (*fraud*) (Utama, 2017). Teori ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Widari & Sutrisno (2017) dan Riandani (2017) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Transparansi merupakan salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintah. Keterbukaan dan kemudahan informasi penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya (Umami & Nurodin, 2017). Teori ini telah dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rifandi (2019) dan Amalia Rizky (2017) yang menyatakan bahwa transparansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

**Gambar. 1**  
**Kerangka berpikir**



Berdasarkan penjelasan teori dan penelitian terdahulu di atas maka hipotesis dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

- H1 : Implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
- H2 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
- H3 : Sistem pengendalian inter berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

desa.

H4 : Transparansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

### METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah desa di kabupaten sleman yang terdiri dari 17 Kecamatan dan 86 Desa. Sampel dalam penelitian ini adalah pemerintah desa yang ada di kecamatan Pakem kabupaten Sleman. Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki dari sebuah populasi desa di kecamatan Pakem kabupaten Sleman yang meliputi 5 Desa yaitu:

1. Desa Candibinangun
2. Desa Hargobinangun
3. Desa Harjobinangun
4. Desa Pakembinangun
5. Desa Purwobinangun

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini terhadap responden dilakukan dengan menggunakan metode non probabilitas atau pemilihan non random berupa purposive sampling. Purposive sampling dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer dapat didefinisikan sebagai data yang dikumpulkan secara langsung yang berasal dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu. Pengumpulan data diperoleh dari jawaban atas kuesioner yang dibagikan kepada responden. Pertanyaan peneliti dan jawaban responden dapat dikemukakan secara tertulis melalui suatu kuesioner. Kuesioner tersebut disebar oleh peneliti secara langsung kepada responden tanpa melalui perantara.

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini, untuk mengukur variabel independen dan dependen peneliti menggunakan kuesioner dengan menggunakan pengukuran skala likert 5 point. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah menggunakan *software Statistical Package for Social Sciences (SSPS) versi 24*. Data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner akan diolah melalui beberapa tahap pengujian.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Uji Normalitas

**Tabel 1**  
**Hasil Uji Normalitas**

		<i>Unstandardized Residual</i>			
Berdasarkan perhitungan tabel 1 data dinyatakan dengan normal. Hal dengan nilai Smirnov sebesar signifikansinya yang berarti lebih nilai alpha , yaitu	N		38	hasil diatas, maka berdistribusi ini ditunjukkan Kolmogorov- Smirnov sebesar 0,67 besar daripada 0,05.	
	<i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>	<i>Mean</i>	0,000000		
		<i>Std. Deviation</i>	2,14930165		
	<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	0,138		
		<i>Positive</i>	0,080		
		<i>Negative</i>	-0,138		
	<i>Kolmogorov-Smirnov Z</i>		0,138		
	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		0,67 <sup>c</sup>		
	<i>a. Test distribution is Norm</i>				
	<i>b. Calculated from data.</i>				

Sumber: Data Primer diolah 2022

#### Uji

#### Multikolinieritas

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Multikolinieritas**

<i>Collinearity Statistics</i>		
Model	<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>
1 ( <i>Constant</i> )		
Implementasi Sistem Keuangan Desa	0,464	2,157
Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,466	2,145
Sistem Pengendalian Intern	0,429	2,331
Transparansi	0,475	2,106

a. *Dependent Variable: Kualitas\_LKPDes*  
Sumber: Data Primer diolah 2022

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 2 diatas, maka variabel implementasi sistem keuangan desa memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,464 dan nilai VIF sebesar 2,157. Kompetensi sumber daya manusia memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,466 dan nilai VIF 2,145. Sistem pengendalian intern memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,429 dan nilai VIF sebesar 2,331, dan variabel transparansi memiliki nilai *tolerance* sebesar 0,475 dan nilai VIF 2,106.

### Uji Heteroskedastisitas

**Tabel 3**  
**Hasil uji Uji Heteroskedastisitas**

Model	<i>nstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<b>B</b>	<i>Std. Error</i>	<b>Beta</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
1 ( <i>Constant</i> )	4,988	2,118		2,355	0,025
Implementasi Aplikasi Siskeudes	-0,059	0,067	-0,211	-0,874	0,388
Kompetensi Sumber Daya Manusia	-0,048	0,054	-0,213	-0,886	0,382
Sistem Pengendalian Intern	-0,005	0,077	-0,016	-0,064	0,949
Transparansi	0,051	0,088	0,137	0,573	0,571

a. Dependent Variable: ABS\_RI

Berdasarkan hasil perhitungan tabel 3 yang dimana nilai signifikansi dari variabel implementasi aplikasi sistem keuangan desa sebesar 0,388. Kompetensi sumber daya manusia nilai signifikansi sebesar 0,382. Nilai signifikansi dari variabel sistem pengendalian intern sebesar 0,949. Variabel transparansi memiliki nilai signifikansi sebesar 0,571, maka penelitian ini dinyatakan lolos dari masalah heteroskedastisitas karena nilai signifikansi masing-masing variabel berada diatas 0,05.

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	<i>nstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>		
	<b>B</b>	<i>Std. Error</i>	<b>Beta</b>	<b>t</b>	<b>Sig.</b>
1 ( <i>Constant</i> )	5,555	3,413		1,627	0,113
Implementasi Aplikasi Siskeudes	0,246	0,109	2,205	2,263	0,030

---

Kompetensi Sumber Daya Manusia	0,291	0,087	0,300	3,330	0,002
Sistem Pengendalian Intern	0,322	0,124	0,245	2,604	0,014
Transparansi	0,564	0,142	0,355	3,973	0,000

---

a. Dependent Variable: KLIK\_PDes  
Sumber: Data Primer diolah 2022

Berdasarkan tabel 4 diatas, dapat dihasilkan persamaan linier sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

$$Y = 5,555 + 0,246 X_1 + 0,291 X_2 + 0,322 X_3 + 0,564 X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan tersebut dapat dilihat dari masing-masing hubungan variabel sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 5,555 menyatakan bahwa tanpa adanya pengaruh dari keempat variabel independen, nilai kualitas laporan keuangan pemerintah desa adalah sebesar 5,555.
2. Koefisien korelasi/*slope* variabel implementasi aplikasi sistem keuangan desa berarah positif dan signifikan sebesar 0,246 yang berarti setiap kenaikan satu-satuan yang dialami oleh implementasi aplikasi sistem keuangan desa maka akan diikuti oleh kenaikan kualitas laporan keuangan pemerintah desa sebesar 0,246. Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa dianggap konstan.
3. Koefisien korelasi/*slope* variabel kompetensi sumber daya manusia berarah positif dan signifikan sebesar 0,291 yang berarti setiap kenaikan satu-satuan yang dialami oleh kompetensi sumber daya manusia maka akan diikuti oleh kenaikan kualitas laporan keuangan pemerintah desa sebesar 0,291. Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa dianggap konstan.
4. Koefisien korelasi/*slope* variabel sistem pengendalian intern berarah positif dan signifikan sebesar 0,322 yang berarti setiap kenaikan satu-satuan yang dialami oleh sistem pengendalian intern maka akan diikuti oleh kenaikan kualitas laporan keuangan pemerintah desa sebesar 0,322. Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa dianggap konstan.
5. Koefisien korelasi/*slope* variabel transparansi berarah positif dan signifikan sebesar 0,564 yang berarti setiap kenaikan satu-satuan yang dialami oleh transparansi maka akan diikuti oleh kenaikan kualitas laporan keuangan pemerintah desa sebesar 0,564. Dalam hal ini faktor lain yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa dianggap konstan.

## Hasil Uji Simultan (Uji F)

Tabel 6  
Hasil Uji Simultan (Uji F)

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>Df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	1196,158	4	299,039	57,736	0,000 <sup>b</sup>
	Residual	170,921	33	5,179		
	Total	1367,079	37			

Berdasarkan tabel 6 diatas yang menggambarkan hasil uji simultan (uji F) menyatakan bahwa keempat variabel independen berpengaruh signifikan sebesar 0,000. Uji signifikan simultan juga dapat diperhitungkan atas nilai F hitung lebih besar dari F tabel, maka hipotesis tidak dapat ditolak (koefisien regresi signifikan). ). Nilai F hitung dalam penelitian ini adalah sebesar 57,736 yang berada diatas nilai F tabel 2,6589. Dengan demikian, keempat variabel independen, yaitu implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan transparansi dapat berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Tabel 7  
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

Model	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Error of the Estimate</i>
1	0,935 <sup>a</sup>	0,875	0,860	2,275

a. Predictors: (Constant), Transparansi, Implementasi\_Siskeudes, Kompetensi\_SDM, SPI  
b. Dependent Variable: Kualitas\_LKPDes

Berdasarkan perhitungan tabel 7 diatas, dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R square adalah sebesar 0,860 atau 86%. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi aplikasi sistem keuangan desa, kompetensi sumber daya manusia, sistem pengendalian intern dan transparansi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah desa sebesar 86%. Sedangkan sisanya 14% dipengaruhi faktor lain diluar variabel penelitian

## KESIMPULAN

Analisa data dilakukan terhadap 38 responden yang terlibat langsung dalam pencatatan transaksi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah desa di wilayah kecamatan pakem kabupaten sleman. Dari hasil penelitian dan pembahasan peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- Hipotesis pertama yang menyatakan implementasi aplikasi sistem keuangan desa berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
- Hipotesis kedua yang menyatakan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
- Hipotesis ketiga yang menyatakan sistem pengendalian intern berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa.
- Hipotesis keempat yang menyatakan transparansi berpengaruh positif pada kualitas laporan keuangan pemerintah desa.

## REFERENSI

- Amalia Rizky. (2017). Pengaruh Pemahaman Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Transparansi, Pelatihan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan. *Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Sumatera Utara*.
- Andrianto, E., & Rahmawati, D. (2017). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Kabupaten Sleman ). *Jurnal Fakultas Ekonomi*, 1–19.
- Ari, : Santo. (2019). *Kepala Desa Banyurejo Ditahan atas Dugaan Korupsi Dana Desa*. Tribun Jogja.Com.
- Febriyanto, H. W. (2019). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Klaten)*. Universitas SarjanaWiyata Tamansiswa.
- Ghozali, I. (2016.). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 24 (Edisi 8)*. Cetakan ke VIII. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardyansyah. (2016). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderasi (Studi empiris pada SKPD Kabupaten Polewali Mandar)*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2015). *Aplikasi Siskeudes untuk Transparansi Keuangan Desa*. [www.kominfo.go.id/content/detail/15734/Aplikasi-Siskeudes-Untuk-Transparansi-Keuangan-Desa/0/Artikel\\_gpr](http://www.kominfo.go.id/content/detail/15734/Aplikasi-Siskeudes-Untuk-Transparansi-Keuangan-Desa/0/Artikel_gpr).
- Kusuma, A. A. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Boyol. *Skripsi*, 106(11), 1323–1330.
- Lubis, M. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan SAP Berbasis Akrual, dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern ....* Universitas Sumatera Utara.
- Modo, S. M., Saerang, D. P. E., & Poputra, A. T. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 7(2), 14–30. <https://doi.org/10.35800/jjs.v7i2.13550>
- Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005. (2005). *tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010. (2010). *Standar AKuntansi Pemerintahan*.
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 *Tentang System Pengendalian Internal*. (n.d.).
- Putri, A. M., Kirmizi, K., & Basri, Y. M. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Sebagai Pemediasi. *Jurnal Ekonomi*, 24, 16–31.
- Ramadhan, F. H. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Kompetensi Staf Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Riandani, R. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sdm, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Skpd Kab. Limapuluh Kota )*. Universitas Negeri Malang.
- Rifandi, Z. W. (2019). Pengaruh Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. In

- Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa* (Vol. 4, Issue 1). Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Desa. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i1.4505>
- Riyanti, F. (2017). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Sukoharjo). *Jurnal Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 1–13.
- Siahaan, N. R. (2018). *Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Deli Serdang*. Universitas HKBP Nommensen.
- Susanti. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Tentang Pp No 71 Tahun 2010, Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris Pada Badan Usaha Milik Desa Di Kabupaten Kulonprogo*.
- Sutrisno, W. L. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada DPPKAD,SETDA dan KOMINFO Kota Sukabumi. *ISSN, 20886969, Vol.5, 10*.
- Umami, R., & Nurodin, I. (2017). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.
- Utama, R. julia. (2017). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi , Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). *JOM Fekom*, 4(1), 1429–1443.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i2.270>